
**ISU KEKERASAN DALAM RELASI GENDER; SEBUAH ANALISIS ATAS NILAI
KESETARAAN GENDER DI LINGKUNGAN SEKOLAH
(STUDI KASUS DI MI CIWATIN PANCATENGAH TASIKMALAYA)**

Arsyul Munir

Program Studi HTN (Siyasah) - Institut Agama Islam Tasikmalaya

arsyul.munir@iaitasik.ac.id

Abstrak

Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga kini menjadi salah satu tema yang terus memantik logika banyak kalangan untuk memperbincangkannya. Pelbagai kalangan dari mulai tingkatan institusi, praktisi, aktivis hingga pemikir ramai-ramai mengangkat isu ini ke dalam kancah yang tak hanya berhenti pada tingkat wacana, melainkan juga sampai pada ranah kebijakan. Popularitas tema ini sampai pula pada konteksnya sebagai program yang menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sebuah institusi. Itulah mengapa latar penelitian ini akan lebih memotret isu kekerasan berbasis gender dalam institusi sosial di tingkat satuan pendidikan mendasar, Madrasah Ibtidaiyyah (MI). Alasannya sederhana, bahwa institusi pendidikan –dengan segala fasilitas akademik yang ada di dalamnya–, dipandang seharusnya mampu untuk menggelorakan pendidikan multikultural yang berorientasi pada penguatan kualitas kesadaran kesetaraan gender terhadap peserta didiknya. Sementara itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori gerakan ganda yang menjadikan ide sebagai sebuah gagasan yang bermetamorfosis menjadi gerakan dan proses. Dalam konteks itu, problematika kekerasan berbasis gender di MI Ciwatin Pancatengah akan dipotret secara menyuruh dengan cara mengkonfrontirnya versus idea tentang kesetaraan gender yang tak lagi berhenti pada aspek wacana monolog, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan dan berproses menjadi kesadaran paradigma yang komprehensif pada setiap peserta didik yang berada di bawah naungan MI Ciwatin, Pancatengah, Tasikmalaya. Sebagai simpulan sementara, tampaknya ide kesetaraan gender yang dikembangkan MI Ciwatin lebih merupakan sebuah proses yang berorientasi pada *empowering school culture*. Kerangka pelaksanaannya ditopang oleh 3 dimensi fundamental yang saling bertautan; pertama, *equity pedagogy* berupa semangat pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan baik secara langsung maupun tidak langsung; kedua, *content integration* yang berarti perpaduan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam struktur dan standar pendidikan *existing*; ketiga, *knowledge construction* yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang kokoh lagi meluas dan mendalam. Semua ini bertumpu pada satu titik tuju yaitu; meminimalisir potensi prasangka buruk yang mungkin saja terdapat pada para peserta didik MI Ciwatin terhadap segala perbedaan yang ada. (*prejudice reduction*).

Kata Kunci: kekerasan berbasis gender; nilai kesetaraan perspektif gender; pendidikan multikultural

Abstract

Gender Mainstreaming until now has become one of the themes that continues to trigger the logic of many people to discuss it. Various groups, starting from the level of institutions, practitioners, activists to thinkers, are busy raising this issue in the arena which does not only stop at the level of discourse, but also extends to the realm of policy. The popularity of this theme also extends to its context as a program that is part of the implementation of the duties and/or functions of an institution. That is why the background of this research will focus more on the issue of gender-based violence in social institutions at the basic education unit level, Madrasah Ibtidaiyyah (MI). The reason is simple, that educational institutions -with all the academic facilities in them-, are seen as supposed to be able to inflame multicultural education which is oriented towards strengthening the quality of awareness of gender equality in its students. Meanwhile, the framework in this study uses the theory of multiple movements which makes an idea an idea that metamorphoses into a movement and a process. In that context, the problems of gender-based violence in MI Ciwatin Pancatengah will be photographed in an orderly way by confronting it versus the idea of gender equality which no longer stops at monologue aspects of discourse, but has transformed into a movement and processes into a comprehensive paradigm awareness in every student. which is under the auspices of MI Ciwatin, Pancatengah, Tasikmalaya. As a temporary conclusion, it seems that the idea of gender equality developed by MI Ciwatin is more of a process oriented towards empowering school culture. The implementation framework is supported by 3 fundamental dimensions which are interlinked; first, equity pedagogy in the form of the spirit of equality education which is implemented either directly or indirectly; second, content integration which means the combination of multiculturalism values into the existing educational structure and standards; third, knowledge construction that leads to the development of solid, broad and deep knowledge. All of this rests on one point, namely; minimize the potential for prejudice that may exist in MI Ciwatin students against all differences.

Keywords: gender based violence; gender perspective equality value; multicultural education

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga kini menjadi salah satu tema paling seksi yang terus memantik logika banyak kalangan untuk terus memperbincangkannya. Pelbagai kalangan dari mulai tingkatan institusi, praktisi, aktivis hingga pemikir ramai-ramai mengangkat isu ini ke dalam kancah yang tak hanya berhenti pada tingkat wacana, melainkan juga sampai pada ranah kebijakan. Popularitas tema ini sampai pula pada konteksnya sebagai program yang menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sebuah institusi. (Santoso, 2016 : 5)

Nilai dasar perjuangan PUG adalah soal kesetaraan gender. Dari perspektif global, komitmen untuk memasyarakatkan pikiran ini telah dimulai secara intensif pada berbagai konferensi dunia, di antaranya adalah Konferensi Dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, hingga yang paling mutakhir di Beijing (1955) dimana secara serius dijadikan semacam tolok tumpu keseriusan perjuangan dunia dalam mencapai keadilan gender secara global (*Beijing Platform for Action – BPFA*). Terdapat banyak negara yang mengadopsi rasionalitas komunikatif tersebut dan mengevaluasinya secara berkala. Indonesia salahsatunya. (Supardjaja, 2006 : 7-8)

Pertanyaannya adalah sejauh mana komitmen PUG memberi kontribusi positif setelah sekian lama diadaptasi (?) Jawabannya mungkin ambigu. Tergantung sudut pandang. Harapannya tentu semua isu tentang kekerasan dalam relasi gender di bumi pertiwi memudar. Namun faktanya berbicara lain. Disukai atau tidak, sesungguhnya ketimpangan berbasis gender itu masih terus terjadi bahkan hingga ke level institusi, alih-alih individual. Manifestasinya cukup beragam, dari mulai adanya stereotype yang keliru, *prejudice* terhadap *the*

others, kekerasan verbal dan seksual, beban ganda (*double garden*), hingga marjinalisasi dan lain sebagainya.

Tentu statemen ini semakin dipertegas kemungkinannya oleh pemenuhan data di lapangan. Perjuangan PUG di Indonesia nyari berbanding terbalik dengan komitmen yang sama di negara-negara lainya. Data yang dikeluarkan di dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 saja, terjadi peningkatan kekerasan berbasis gender hampir menyentuh angka 50 %. Terhimpun dari sumber data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga layanan lainnya bahwa angka pengaduan yang berdasar atas kekerasan dalam relasi gender sebanyak 350.000-an aduan. (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2019 : 55). Tentu saja jumlah ini tak sekedar nominal yang diam. Ia adalah teks sosial yang menunjukkan masih adanya ketimpangan pola interaksi yang abai terhadap kesetaraan gender. Lebih jauh, radius kekerasan tersebut boleh jadi melampaui spektrum antar-instansi sosial yang seharusnya menumbuh-kembangkan kesadaran multikultural yang mengandaikan nilai-nilai keadilan, demokrasi, humanisme, *equity pedagogy*, kesetaraan (*egalitarianism*), kemajemukan (*plurality*), kebangsaan (nasionalisme), dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia (HAM). (Nurasmawi, Ristiliana, 2021 : 52)

Itulah mengapa konteks penelitian ini akan lebih memotret isu kekerasan berbasis gender dalam institusi sosial di tingkat satuan pendidikan mendasar, Madrasah Ibtidaiyyah (MI). Alasannya sederhana, bahwa institusi pendidikan – dengan segala fasilitas akademik yang ada di dalamnya–, dipandang seharusnya mampu untuk menggelorakan pendidikan

multikultural yang berorientasi pada penguatan kualitas kesadaran kesetaraan gender terhadap peserta didiknya. Barangkali harapan ini tak terlalu euphoria, mengingat output dari sebuah tata kelola pendidikan yang baik haruslah merepresentasikan sekelompok agen perubahan sosial yang memiliki kepekaan rasional yang memukau, baik dari tampilan karakter kognitif, kecerdasan emosional, maupun kebijaksanaan spiritualnya.

Untuk mengukur keberhasilan PUG di kota Tasikmalaya, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan salah satu ukuran tingkat capaian keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhannya lebih dilihat dari 3 dimensi; umur yang panjang, hidup yang sehat, serta pengetahuan dan standar hidup yang layak. Kecuali itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga diberlakukan, utamanya oleh dinas terkait, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, sebagai indeks komposit yang mengukur peran aktif gender dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pendidikan dimulai dari hal ihwal partisipasi, pengambilan keputusan serta penguasaan atas sumber daya alam dan pengetahuan sebagai dimensinya. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011 : 2-3)

Sesungguhnya peranan kaum wanita sebagai target dari PUG tersebut sudah cukup menggemberikan. Namun tentu masih dikelilingi dengan berbagai catatan serius yang akan dibentangkan melalui penelitian kali ini. Paling tidak, data tersurat dari dinas terkait menegaskan yang sama sebagai berikut; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2019 : 58)

Realisasi IPG dan IDG

Kota Tasikmalaya Tahun 2019

TAHUN	2019
IDG	91.48
IPG	62.92

Paparan data ini mengindikasikan satu hal bahwa capaian Pengarusutamaan Gender cenderung meningkat. Artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Kota Tasikmalaya relatif berhasil karena dianggap telah mencapai sasarannya yang cukup signifikan.

Sementara itu, grafik isu kekerasan berbasis gender di Tasikmalaya secara umum diisi oleh kekerasan terhadap anak dengan pelbagai derivatnya dari mulai pencabulan, penganiayaan, *bullying*, pemerkosaan, perebutan hak asu anak, penculikan anak, percobaan pembunuhan terhadap anak, trauma akibat kenakalan pada remaja, sodomi, penelantaran anak dan kekerasan yang bersifat psikis.

Beberapa faktor pemicu ketertindasan kaum perempuan dari persektif gender dalam konteks pendidikan umpamanya dapat ditelusuri sebagai berikut; *Pertama*, dalam iklim pendidikan yang demokratis, kaum pria tampaknya menjadi mayoritas yang memungkinkan dirinya lebih dipandang berkualitas dan bermutu. Hal ini dipertegas dengan kenyataan kultur sosial masyarakat Tasikmalaya yang masih menganut sistem patriarkal di dalam segala aspek kehidupannya. (Safri, 2012:121)

Kedua, kaum perempuan dengan peranan domestiknya sebagai ibu rumah tangga, cenderung dianggap kurang berkompeten dalam pengurusan administrasi kelembagaan yang *concern* dengan peran-peran institusi negara dan lain seterusnya. Dugaan ini dimungkinkan muncul karena adanya prasangka tentang perbedaan orientasi pemikiran antara laki-laki dan perempuan, dimana yang pertama berkarakter eksternal-inklusif ketimbang entitas terakhir yang lebih internal-

eksklusif.

Ketiga, adanya sifat *nature* dari perempuan yang secara biologis diklaim kurang dapat mendorong ritme kerja dalam bidang apapun. Kondisi-kondisi natural semacam hamil, menyusui, mengurus anak-anak dan menstruasi merupakan hambatan alamiah di dalam situasi pekerjaan yang kadang menghadirkan tekanan-tekanan yang melelahkan.

Kelima, reduksi problematika *nurture* menjadi bagian dari isu *nature*, sehingga kaum perempuan yang melibatkan dirinya ke dalam ranah pekerjaan non-domestik dipelintir menjadi suatu kejanggalan yang secara sosial di luar batas nalar kewajarandirinya sebagai perempuan. Dampaknya gegara hal itu, tak jarang malah melahirkan sikap *minder* dan menurunkan semangat juang mereka di tingkat praksis.

Kelima, adanya faktor superioritas kaum laki-laki sebagai suami atas perempuan sebagai istrinya. Alih-alih menjalin kebersamaan rumah tangga dengan spirit saling mengisi, melengkapi, dan membahagiakan –meskipun harus berprofesi keluar secara berbeda–, malah terkadang psikologi dominan kaum laki-laki memunculkan ruang baru yang mengatas-namakan kompetisi hingga berujung konflik.

Tujuan dari penelitian ini untuk memotret sejauh mana isu kekerasan berbasis relasi gender dalam konteks pendidikan dapat terkondisikan secara signifikan oleh PUG yang saat ini telah menjadi perhatian sentral para pelaksana negara. Lalu terpenting, bagaimana nilai kesetaraan dalam lanskap pendidikan multikultural memberikan pengaruhnya secara signifikan terhadap civitas akademika, khususnya pada satuan pendidikan MI di wilayah desa Ciwatin, Pancatengah, Tasikmalaya.

KAJIAN LITERATUR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya. Bentuk perilaku tersebut meliputi kekerasan fisik, seksual, mental, pemaksaan, ancaman, ataupun perbuatan yang membatasi kebebasan seseorang berkaitan dengan gendernya. Dari berbagai bentuk perilaku kekerasan berbasis gender tersebut dapat diuraikan lagi bentuk kejahatan yang mungkin terjadi. Misalnya kekerasan seksual yang dapat melahirkan kejahatan berupa pelecehan atau bahkan eksploitasi seksual. Atau contoh lain adalah kekerasan mental yang dapat menyebabkan kejahatan penyebaran berita hoax dan pencorengan nama baik yang memiliki motif atau asumsi bias gender. (Purwanti, 2020:1)

Demi mencegah maraknya kekerasan berbasis gender, sudah menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk memahami penyebab yang mengakari terjadinya berbagai catatan kasus tersebut. Sebenarnya penyebab kekerasan berbasis gender cukup beragam. Akan tetapi, tidak semua kekerasan, baik fisik maupun mental, dapat diidentifikasi dengan mudah penyebabnya. Kadang perlu penelahaan yang mendalam serta observasi yang intensif terhadap korban ataupun pelaku yang berkaitan. Pada kesempatan kali ini Penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang seringkali menjadi “biang kerok” ketidakadilan gender yang kemudian tidak jarang berujung pada terjadinya kekerasan berbasis gender. (Hasan, 2019:74-75). Di antaranya adalah sebagai berikut :

A. *Mansplaining*

Mansplaining merujuk pada

situasi saat laki-laki berbicara seolah-olah mereka tahu segalanya melebihi perempuan. Mereka kerap memberikan komentar tanpa diminta lawan bicaranya dan meremehkan kemampuan juga pendapat perempuan. Bahkan pada berbagai kesempatan seseorang yang melakukan *mansplaining* bersikap seperti sedang menggurui dan menganggap perempuan yang menjadi lawan bicaranya tidak lebih pintar. Sikap inilah yang seringkali menimbulkan perdebatan yang berujung pada kekerasan mental secara online. Online harassment yang berawal dari perdebatan di media sosial dapat berlanjut kepada pelecehan secara berulang, ancaman langsung, ujaran kebencian, atau bahkan penghasutan terhadap kekerasan fisik.

B. Toxic masculinity

Menurut Flood (2018), *toxic masculinity* merupakan konsep maskulinitas yang menekankan aspek kekuatan, dominasi, superioritas, penaklukan dan karakter lainnya yang diidentikan dengan laki-laki. Konsep yang keliru ini berkontribusi atas ketidaksetaraan gender yang merugikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dampaknya bagi laki-laki adalah timbulnya paradigma yang mengharuskan seorang laki-laki untuk membuktikan kepada dunia bahwa dirinya tidak terlihat lemah lembut atau kurang jantan. Paradigma tersebut menjadi konsekuensi yang seakan harus ditanggung oleh semua laki-laki walaupun mereka tidak pernah sekalipun memiliki sikap *toxic masculinity*. Sedangkan bagi perempuan, dampaknya adalah pelecehan seksual baik secara fisik maupun mental. Hal ini disebabkan karena *toxic masculinity* cenderung menyebabkan laki-laki berperilaku seksis dan patriarkis.

C. Lean In

Jika *toxic masculinity* adalah penyebab yang muncul dari diri laki-laki, lain halnya dengan *lean in*. *Lean in* merupakan hambatan yang muncul dari diri perempuan dikarenakan budaya dan pengajaran yang dilakukan terus-menerus yang senantiasa membentuk pola pikir mereka. Peran gender normatif yang kaku dan terus mendikte perempuan membuat mereka menginternalisasi pesan-pesan yang mengatakan dirinya tidak boleh terlalu ambisius, vokal, dan berani. Pola asuh terhadap anak perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pola pikirnya ketika dewasa. Lingkungan kerja yang masih memprioritaskan gender tertentu dalam peluang berkarir juga memiliki andil membentuk mindset perempuan yang pesimistis dalam mengejar karirnya pada berbagai bidang pekerjaan.

Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas, Penulis mengutip pendapat seorang psikolog yang juga merupakan Dosen Psikologi Universitas Surabaya, Dr. N.K. Endah Triwijati. Pada salah satu webinarnya, beliau menyampaikan bahwa biasanya pelaku kekerasan berbasis gender melakukan perbuatan tercelanya untuk membuktikan pada dirinya dan orang lain bahwa dia punya kuasa dan mampu mengendalikan serta mendapatkan apa yang dia mau. Beliau juga menyatakan bahwa tidak jarang para korban tidak merasa dirinya sebagai korban dari kekerasan berbasis gender. Maka menjadi tugas bersama untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang merata mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di berbagai bidang kehidupan. Meski terdengar cukup klasikal dan membosankan, tetapi nyatanya sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender mesti kembali digalakkan.

Perbincangan dan perjuangan

hak-hak perempuan timbul karena adanya kesadaran pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa kaumnya. Perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pergerakan kaum perempuan di dunia. Perkembangan gerakan kaum perempuan menunjukkan kemajuannya dengan munculnya wacana gender pada tahun 1977, hal tersebut di latar belakang oleh sekelompok feminis di London yang tidak lagi menggunakan isu-isu seperti patriarcal, namun mereka lebih memilih menggunakan gender discourse. Munculnya perkembangan gerakan perempuan di belahan dunia, membawa imbas terhadap gerakan perempuan di Indonesia.

Di Indonesia, masalah gender muncul dalam bahasa emansipasi wanita yang menggunakan ikon R.A. Kartini. Gerakan emansipasi wanita yang dilakukan R.A. Kartini, telah merintis jalan yang terang untuk membawa kaum perempuan dan perhatian bangsa Indonesia ke arah cita-cita nasional. Walaupun R.A. Kartini belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan, namun Kartini tetap optimis bahwa cita-citanya akan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Kartini sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya itu, masih cukup banyak rintangan dan hambatan yang sulit untuk dihindarkan. (Amar, 2017 : 106-108)

Hanya melalui pendidikan dan pelajaran yang baik, maka kedudukan dan kebahagiaan kaum wanita dapat diperbaiki dan seterap dengan kaum pria, dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini tampak dalam buku "Habis Gelap Terbitlah Terang", oleh R.A. Kartini terjemahan Armin Pane yang berbunyi: "Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan baik-baik. Dan untuk

keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan didikan karena inilah yang akan membawa bahagia baginya" (Sudiyo, 2004: 11-12). Dari isi karya R.A Kartini tersebut di atas telah menunjukkan wawasan, masa depan yang cerah bagi kaum wanita khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Kartini memang banyak mengungkapkan tentang cita-cita perjuangan yang jauh ke depan, namun sangat disayangkan bahwa cita-cita R.A. Kartini belum banyak dikenal oleh masyarakat pada waktu itu.

Munculnya ide emansipasi wanita oleh Raden Ajeng Kartini membawa pengaruh besar dalam pergerakan kaum perempuan di Indonesia. RA Kartini yang merupakan pelopor dan pendobrak ketertindasan kaum perempuan mampu mengangkat martabat kaumnya dengan memajukan pendidikan untuk kaum perempuan itu sendiri. Perjuangan RA Kartini tersebut menumbuhkan semangat perjuangan terhadap kaum perempuan Indonesia untuk melawan tradisi yang sudah mengikat dan kuat tersebut. Akhirnya perjuangan kaum perempuan untuk keluar dari tradisi tersebut mampu dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan untuk kaum perempuan. Perkembangan selanjutnya, muncullah pergerakan kaum perempuan di berbagai daerah dengan membentuk perkumpulan wanita dengan tujuan meningkatkan pendidikan untuk kaum perempuan.

Dari beberapa peranan perempuan tersebut di atas, terdapat banyak pelajaran yang bernilai edukatif. Hal ini dapat dibuktikan dari kegigihan para pemerhati nasib perempuan pada abad XIX, nilai-nilai edukatif tersebut adalah merupakan

hal penting untuk dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan peranan dan prestasi khususnya bagi kaum perempuan.

Sementara itu, nilai-nilai edukatif tersebut sebetulnya merupakan derivasi dari konsep pendidikan multikultural yang berupaya mengajak peserta didik untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah (*sunnatullah*). Kecuali itu, orientasi pendidikan ini peduli untuk menanamkan kesadaran kepada para peserta didik tentang pentingnya kesetaraan, keadilan, kemajemukan, kebangsaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.

Soal kesetaraan ini malah menjadi ruh sistem pendidikan multikultural; sebuah pandangan kesetaraan terhadap manusia, apapun rasnya, gender, agama dan lain seterusnya. Mereka pada intinya memiliki nilai setara satu sama lain. Tak ada individu yang terlahir ke dunia ini sehingga layak untuk didiskriminasi. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh seorang filsuf John Locke di mana ia berpendapat bahwa setiap orang di setiap waktu dan tempat mutlak sama memiliki hak moral alami yang harus dihormati. Sebagaimana dorongan alamiah manusia sendiri yang membuatnya mengetahui tugasnya di dunia ini dengan cara mencintai orang lain, sebagaimana dirinya sendiri. (Nurasmawi, Ristiliana, 2021 : 57)

Tentu saja perlakuan yang sama ini tidak perlu diartikan sebagai sesuatu yang setakaran, melainkan harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sebagai contoh, orang yang menyandang disabilitas tidak mungkin diperlakukan secara sama dengan orang yang memiliki fisik atau mental yang normal. Dengan demikian, makna kesetaraan akan

sangat jauh berbeda dengan makna kesamaan. Bahkan dapat diartikan bahwa justru setara itu tidaklah sama. Sehingga ambisi penyamaan dengan semboyan kesetaraan akan berakibat fatal terhadap munculnya nilai-nilai diskriminatif.

Tak dapat dipungkiri bahwa keinginan setiap manusia dapat terlahir dari kelas sosial atas. Namun nyatanya yang terjadi sebaliknya. Karena itu mustahil untuk mendistribusikan kebijakan yang cenderung mempersamakan setiap kelas dan/atau golongan.

Dari sini maka kesetaraan hanya dapat diusahakan dari berbagai pengambilan opsi yang sama, pemberian kesempatan yang serupa dengan tak harus merambah pada capaian hasil yang sama. Maka menurut Dworkin, ketidak setaraan pada aspek ini dapat dibenarkan secara historis ketikak orang-orang itu membuat pilihannya dengan serangkaian hak akses yang setara.

Harus dikatakan pula bahwa masyarakat yang terbentuk dari ruang lingkup dan latar belakang yang berbeda-beda menciptakan suatu pola hubungan yang plural. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan nilai-nilai kesetaraan juga ikut diperbaharui dalam konteks penyesuaiannya dengan semangat zaman. Maka penguatan paham egaliteriansime ini tidak luput dari suatu pandangan yang diungkapkan oleh Derek Parfit bahwa nilai-nilai kesetaraan itu berubah-ubah tergantung dari nilai moral yang berlaku di suatu peradaban.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek, kemudian

dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini. Lalu dicoba untuk diberikan pemecahan masalahnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah teknik dokumentasi, observasi, survey serta wawancara dengan pelaksana di lapangan terakat.

Sementara itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori gerakan ganda yang menjadikan ide sebagai sebuah gagasan yang bermetamorfosis menjadi gerakan dan proses. Dalam konteks itu, problematika kekerasan berbasis gender di MI Ciwatin Pancatengah akan dipotret secara menyuruh dengan cara mengkonfrontirnya versus idea tentang kesetaraan gender yang tak lagi berhenti pada aspek wacana monolog, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan dan berproses menjadi kesadaran paradigma yang komprehensif pada setiap peserta didik yang berada di bawah naungan MI Ciwatin, Pancatengah, Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat, bahkan di sebagian besar belahan dunia sekalipun, termasuk di Tasikmalaya. Alasannya cukup jelas, bahwa masyarakat secara umum belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkal yang selama ini menjerat dan memaksa kaum perempuan di bawah dominasi kaum pria. Maka bukan tanpa alasan, bila pendidikan menjadi sangat penting bagi kaum perempuan, karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas generasi muda.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi kaum perempuan, mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama. Namun praktis, ruang gerak kaum perempuan dibatasi karena perspektif yang kurang adil dalam memposisikannya sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal pendidikan.

Dalam konteks ini, peneliti memilih lokus penelitian di MI Ciwatin, Pancatengah sebagai objek kajiannya. Dengan jumlah warga sekolah yang cukup memadai, baik siswa, siswi, maupun tenaga guru dan karyawan, tentu lembaga ini merupakan gambaran masyarakat kecil yang tak terhindar dari interaksi dan relasi antar gender. Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui sejauhmana kesadaran warga sekolah di satuan pendidikan MI Ciwatin signifikan terhadap arus Pengutamaan Gender, sebagaimana telah digambarkan di atas. Kecuali itu, penelitian ini juga akan melihat relevansi sistem pendidikan MI Ciwatin terhadap ide kesetaraan yang berkarakter multikultural.

Untuk kepentingan tersebut, maka hasil pembahasannya akan dibuat secara sistematis sebagai berikut:

A. Isu Kesetaraan Perspektif Gender

Isu kesetaraan dalam perspektif gender sesungguhnya dilatari oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya fakta keberlangsungan nilai-nilai dan konsep budaya patriarkhi, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungna kekuasaan yang tak setara sehingga menimbulkan diskriminasi gender; *Kedua*, pada gilirannya diskriminasi gender mengakibatkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan

terhadap mereka dalam berbagai bidang kehidupan; *Ketiga*, masih terjadinya fakta kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan negara-bangsa yang berdampak terhadap meningginya tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011 : 9-10)

Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk adanya penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasionalnya, dengan menyusun parameter kesetaraan gender. Parameter inilah yang pada akhirnya diposisikan sebagai *tools* untuk mengintegrasikan isu kesetaraan dalam perspektif gender, sesuai dengan jenis dan hierarkinya melalui analisis gender yang menggunakan berbagai pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas sumber daya secara setara.

Perlu diingat bahwa isu kesetaraan dalam perspektif gender lebih menunjukkan kondisi yang setara dalam hak (hukum) dan kualitas hidup. Sebab bagaimanapun, paradigma gender yang berkuat pada persoalan pembedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku yang tumbuh di antara laki-laki dan perempuan di dalam konstruksi masyarakat luas. Sehingga dengan demikian, peran gender itu takkan terlepas dari tiga hal; peran produktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan.

Paling tidak, konsep kesetaraan dalam perspektif gender dibangun atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan gender sebagai berikut:

1. Hak Asasi Perempuan adalah hak asasi manusia. Prinsip ini mengisyaratkan fundament kemanusiaan yang bebas,

memiliki harkat, martabat dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, Negara wajib pemenuhan hak keduanya secara setara dalam berbagai lini kehidupan.

2. Prinsip-prinsip kesetaraan yang terkandung dalam Konvensi *CEDAW*, yaitu prinsip kesetaraan substantif (kesetaraan dalam akses, kesetaraan dalam kesempatan, dan kesetaraan dalam menikmati manfaat yang setara; prinsip non diskriminasi (penghapusan diskriminasi langsung dan tidak langsung, tanpa membedakan antara pelaku privat dan pelaku publik) dan prinsip kewajiban negara (prinsip penjaminan kesetaraan hak kaum perempuan secara *de jure* dan *de facto* dalam merealisasikan hak-hak kaum perempuan).

Dengan demikian, untuk mengukur efektifitas beragam prinsip kesetaraan tersebut maka diperlukan indikator kesetaraan yang responsif gender. Indikator kesetaraan dalam perspektif gender terdiri atas 4 (empat) faktor, yaitu; akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Keempat indikator tersebut pada dasarnya saling berkaitan satu ng sama lain sehingga mempunyai nilai yang sama kuat, tidak hierarkhis, dan harus dikaji secara holistik.

Pengintegrasian indikator kesetaraan gender dalam tahapan proses pembentukan peraturan perundangundangan, didasarkan pada ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun hak dasar, dan lebih lanjut terjabarkan dalam 40 (empat puluh) hak konstitusional.

Ke-empat belas hak-dasar tersebut, meliputi: 1) Hak atas Kewarganegaraan; 2) Hak atas Hidup; 3) Hak untuk mengembangkan diri; 4) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; 5) Hak atas informasi; 6) Hak atas kerja dan penghidupan yang layak; 7) Hak atas kepemilikan dan perumahan; 8) Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; 9) Hak berkeluarga; 10) Hak atas kepastian hukum dan keadilan; 11) Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; 12) Hak atas perlindungan; 13) Hak memperjuangkan hak; dan 14) Hak atas pemerintahan.

B. Isu Kesetaraan Dalam Relasi Gender; Analisis Tingkat Kesadaran dan Implementasinya di MI Ciwatin, Tasikmalaya

Tampaknya pengarusutamaan gender di MI Ciwatin telah dikondisikan sedemikian rupa oleh para *stake holder* yang bisa dibilang memiliki kepedulian tinggi terhadap hal tersebut. Kondisi ini setidaknya dapat dikuatkan oleh serangkaian agenda pengarus utamaan yang menyisir ide kesetaraan semenjak dari cakrawala pikiran, perbuatan (pergerakan), hingga ke level proses strategis dan taktis.

Gagasan tentang kesetaraan mulai didistribusikan ke dalam beragam standar pendidikan. Terutama dalam beberapa aspek yang kentara; orientasi nilai, kegiatan pembelajaran dan penguatan staf pengajar. Kecuali itu, penyemaian ide kesetaraan gender juga disematkan ke dalam ragam aktifitas sekolah yang sifatnya ekstra kurikuler. Bila dilakukan pemetaan, maka gagasan kesetaraan perspektif gender dapat dikanalisis melalui dua saluran pengetahuan; normatif dan kultural.

Pada kategori normatif, kesadaran multikulturalisme ini banyak

disampaikan oleh para guru di hampir semua mata pelajaran di sekolah. Meski belum ditemukan dalam kurikulum MI Ciwatin mata pelajaran khusus untuk meningkatkan kesadaran multikultural ini, namun setidaknya nilai-nilai multikulturalisme yang berkaitan dengan *equity pedagogy* (pendidikan kesetaraan) disampaikan secara tidak langsung melalui penekanan atas gagasan tersebut secara simultan. Instrumennya dapat berupa *transformation of values*. Sebab pendidikan bukan saja aktifitas transfer pengetahuan, melainkan ada yang lebih urgen daripada hal tersebut, yaitu nilai-nilai multikulturalisme sebagai basis *building character*.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala MI Ciwatin, Nu'man Sidiq bahwa kesetaraan gender pada siswa/siswi MI Ciwatin sudah dilakukan dengan cara menyepikan di sela-sela kegiatan pembelajaran seperti dalam kegiatan upacara dan kegiatan shalat berjama'ah. Beliau melanjutkan : "alhamdulillah selama ini tingkat kesadaran warga sekolah MI Ciwatin sudah memahami akan pentingnya menghargai perbedaan, khususnya perbedaan jenis kelamin, namun semuanya diberi kesempatan yang sama dalam kegiatan melakukan aktifitas KBM, pelatihan kepemimpinan bahkan dalam konteks kompetisi kejuaraan". (Sidiq, 2023 : Wawancara)

Bila diukur dengan indikator kesetaraan perspektif gender yang komposit dari 4 anasir; akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka nyata MI Ciwati secara sederhana juga telah mengakomodir gagasan tentang kesetaraan berbasis gender.

Pada level guru kelas, Wini Yuliani sebagai guru wali turut menyumbangkan satu pemikiran serupa tentang betapa pentingnya sebuah interaksi antar gender yang dilandaskan atas semangat koeksistensi yang berorientasi pada kesetaraan. Lebih

lanjut, pluralitas dan diversitas sebagai ruh pendidikan multikultural menguji akal pikiran peserta didik agar dapat saling menghargai kemajemukan dalam konteks kesetaraan. Kecuali itu, penekanan bahwa perbedaan bukan merupakan suatu kekurangan apalagi kesalahan, turut diinternalisasikan ke dalam karakter peserta didik MI Ciwatin sehingga semua elemen dapat memahami posisinya masing-masing secara objektif dan adil. Itulah mengapa seluruh siswa dan siswi MI Ciwatin tak dibenarkan untuk saling mencela satu sama lain, atas alasan apapun.

Wini mengutarakan dengan lugas bahwa : “Di dalam pembelajaran kelas, kami berusaha untuk memberikan pemahaman pelajaran tentang kesetaraan gender, dimana mereka diajarkan untuk tidak saling mengejek perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga memberi kesempatan yang salam dalam semua kegiatan kepada seluruh siswa, baik laki-laki maupun perempuan, lalu berusaha mengajarkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan sebuah kekurangan tetapi justru kelebihan untuk saling melengkapi.” (Yuliani, 2023 : Wawancara)

Untuk mengukur seberapa dalam tingkat kesadaran gender di MI Ciwatin maka harus diobservasi secara langsung dampak yang dilahirkan dari kerja keras institusi satuan pendidikan tersebut ke dalam perilaku peserta didik MI Ciwatin. Hal ini penting dilakukan untuk melihat penetrasi yang bias gender dalam ruang lingkup interaksi antar gender. Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti mengajukan *depth interview* kepada objek kajian di lapangan untuk menjawab satu pertanyaan yang sama. Oleh karena sampel populasi di MI Ciwatin cukup banyak, maka digunakan pendekatan *snow ball* secara random, membidik para peserta didik dari mulai kelas 1 hingga kelas 5. Ada beberapa di

antaranya yang berhasil didekati secara persuasif. Dan mereka ini rerata memang masih polos-polos. Namun setidaknya justru dianggap mampu mengungkapkan sisi kebenaran objektif yang menunjukkan proses pendidikan di MI Ciwatin berjalan signifikan maupun sebaliknya.

Pertanyaan yang diajukan kepada para peserta didik sengaja dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh selevel pikiran anak-anak. Bahwa “adakah mereka pernah membedakan perlakuan antara kepada teman perempuan dan/atau teman laki-laki di lingkungan sekolah?”; “apakah pernah mengejek teman perempuan dengan mengatakan bahwa mereka cengeng, lemah dan mudah menangis?”; “lalu bagaimana perilakumu terhadap teman-teman perempuanmu, adakah sama atau berbeda bila dibanding dengan tindakanmu terhadap teman-teman laki-lakimu?”. Tiga pertanyaan inilah yang diajukan kepada peserta didik MI Ciwatin untuk mengukur sedalam apa tingkat kesadaran kesetaraan yang tak bias gender.

Dari sementara jawaban yang ada, terdapat beberapa tahapan bagaimana kesadaran itu mulai terekonstruksi dengan baik. Pada awalnya memang harus diakui, bahwa mereka selaku anak-anak masih belum mampu mendalami makna kesetaraan yang seharusnya. Barangkali, fakta tersebut merupakan tahapan awal dari semua tahapan lanjutan yang lebih bersifat konstruktif dan habituatif. Pengonstruksian kesadaran ini tentunya melalui beberapa kanal; transformasi ilmu pengetahuan dan sistem nilai, secara terus berkelanjutan. Bentuknya boleh jadi sekedar nasehat-nasehat ringan di sela-sela pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat ekstra-kurikuler dan lain sebagainya. Sementara pembiasaannya dilakukan melalui pengkondisian mental peserta

didik yang memang masih labil, sehingga cukup mampu untuk menerima perbedaan yang ada kodrati. Dan itu terbukti dengan kesadaran yang terus menumbuh pada setiap sesi pembelajaran tentang kesetaraan.

Arka yang siswa kelas IV juga menampilkan jawaban yang senada, katanya: “saya tidak pernah mengejek teman perempuan. Saya malah sering bermain dan meminta tolong kepada mereka. Justru mereka itu baik. Tidak kasar seperti teman laki-laki. Dan mereka juga pintar dan rajin. Bahkan ada yang juara I di kelas saya.” (Arka, 2023 : Wawancara)

Selaras dengan hal itu, Celara yang merupakan siswa kelas II juga mengindikasikan hal serupa. Ia menimpali: “teman laki-laki di sekolah, ada yang baik dan ada juga yang nakal. Tapi lebih banyak yang baik. Ibu guru bilang, laki-laki dan perempuan sama. Kami belajar dan bermain bersama. Yang membedakan hanya bentuk tubuhnya saja. Begitu kata bu Guru.. katanya lagi, laki-laki yang harus melindungi teman perempuannya.”

Windi, anak kelas I sekalipun yang tampaknya masih sangat polos mengutarakan apa yang disampaikan oleh kak kelasnya, bahwa: “ketika di kelas saat bu Guru membagikan kelompok, biasanya teman laki-laki saya selalu mau satu kelompok dengan saya karena saya baik. Saya pernah ditendang bagian kaki oleh teman laki-laki, tapi kata bu Guru, tidak boleh nakal, sama teman harus baik apalagi sama perempuan harus saling menjaga.”. (Windi, 2023 : Wawancara)

Dari paparan di atas terlihat bagaimana perlakuan dan pemahaman kesetaraan gender di MI Ciwatin telah mendapatkan perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kepala sekolah dan para guru. Selain dalam pembelajaran, sering juga diselipkan dalam berbagai kegiatan di

luar jam pembelajaran.

SIMPULAN

Setelah melakukan observasi sebagaimana disebutkan di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun pada awalnya ditemukan beberapa teks sosial yang bias gender –namun haruslah ia dimaknai dalam bingkai proses “*becoming*”–, yang dihadirkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik secara sadar ataupun tidak, di dalam kelas maupun di luar kelas, baik berdimensi pikiran, sikap dan/atau perlakuan, pada akhirnya sedikit demi sedikit, mereka mulai memahami bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus dipersoalkan dan dijadikan bahan celaan, melainkan adalah suatu hal untuk saling melengkapi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Semua warga sekolah MI Ciwatin sudah diberikan satu paradigma tentang kesetaraan berbasis gender bahwa semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang justru harus dihargai.

Tampaknya, ide kesetaraan gender yang dikembangkan MI Ciwatin lebih merupakan sebuah proses yang berorientasi pada *empowering school culture*. Kerangka pelaksanaannya ditopang oleh 3 dimensi fundamental yang saling bertaut; *pertama, equity pedagogy* berupa semangat pendidikan kesetaraan yang diimplementasikan baik secara langsung maupun tidak langsung; *kedua, content integration* yang berarti perpaduan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam struktur dan standar pendidikan *existing*; *ketiga, knowledge construction* yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang kokoh dan meluas dan mendalam. Semua ini bertumpu pada satu titik tuju yaitu; meminimalisir potensi prasangka buruk yang mungkin saja terdapat pada para peserta didik MI Ciwatin terhadap segala perbedaan yang ada.

(*prejudice reduction*).
Wallahu Ta'ala 'Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : 2011
- Nurasmawi, Ristiliana. *Pendidikan Multikultural*. Riau : 2021
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Tasikmalaya : 2019
- Masitoh, N. *Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasikmalaya*. Jurnal PALASTREN: 2016.
- Santoso, W.M. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, Jakarta, LIPI PRESS : 2016
- Supardjaja, K. E. S. *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: 2006
- Safri, A. H. *Bangkit dari Ketertindasan (Studi atas Pemikiran Kesetaraan Gender Fatayat NU)*. Jurnal Muawa: 2012
- Purwanti. A. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta : 2020
- Hasan, B. *Gender dan Ketidak Adilan*, Jurnal SIGNAL: 2019
- Amar. S. *Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*, Jurnal Fajar Historia : 2017
- Wibowo. T. U. S. *Emansipasi Wanita dalam Bingkai Sejarah Perempuan*, Artikel Kabar Banten, Banten : 2021